

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH
KOTA BITUNG***ANALYSIS OF GOVERNMENT FINANCIAL PERFORMANCE BITUNG CITY*

Oleh :
Priscilia Putri Utami Mailangkay¹
Sri Murni²
Paulina Van Rate³

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Jurusan Manajemen
Universitas Sam Ratulangi

Email :

¹mailangkaypp@gmail.com

²srimurnirustandi@unsrat.ac.id

³paulinavanrate20@unsrat.ac.id

Abstrak : Peran aktif dari pemerintah daerah dalam mengelola daerahnya sendiri, merupakan tantangan yang harus diterima oleh pemerintah agar dapat membangun dan mengelola daerah masing-masing dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kinerja Keuangan Daerah Kota Bitung tahun 2015-2019 dilihat dari: Rasio Keuangan Daerah. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Walikota Bidang Keuangan Kota Bitung. Pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan deskriptif kuantitatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa Kinerja Keuangan Daerah Kota Bitung masih rendah dan masih bergantung kepada pemerintah pusat. Sehingga Pemerintah Daerah Kota Bitung harus mampu meningkatkan dan memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah.

Kata Kunci: Kinerja, Pemerintah, Rasio Keuangan Daerah

Abstract : *The active role of local governments in managing their regions, is a challenge that must be dictated by the government in order to develop and manage their respective regions properly. This study aims to determine the Regional Financial Performance of Bitung City in 2015-2019 seen from Regional Financial Ratios. This research was conducted at the Mayor's Office of Finance in Bitung City. Data collection uses the documentation method. The data analysis technique used is quantitative descriptive. The results of the analysis show that the Regional Financial Performance of the City of Bitung is still low and still depends on the central government. So that the Regional Government of Bitung City must be able to increase and maximize Regional Original Revenue.*

Keywords: *Performance, Government, Regional Financial Ratios*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Peran aktif dari pemerintah daerah dalam mengelola daerahnya sendiri, merupakan tantangan yang harus diterima oleh pemerintah agar dapat membangun dan mengelola daerah masing-masing dengan baik. Sesuai dengan UU Nomor 23 tahun Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah, memberikan kewenangan atau otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada pemerintah daerah secara proposional. Implementasi dari UU tersebut di atas diwujudkan dalam pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada di daerah dalam rangka mencapai kesejahteraan rakyat.

Tabel 1. Realisasi APBD Pemerintah Daerah Kota Bitung Tahun anggaran 2015 – 2019 (dalam Rupiah)

Tahun	Pendapatan Daerah	Belanja Daerah
2015	724,062,475,263.30	756,178,490,437.00
2016	850,221,255,724.63	799,459,099,837.00
2017	869,634,357,168.04	819,983,300,290.00
2018	967,751,473,528.70	987,421,191,731.85
2019	807,353,627,534.26	873,114,666,931.00

Sumber Data: Laporan Realisasi APBD Kota Bitung, 2019.

Dari tabel 1.1 menunjukkan perkembangan APBD di Kota Bitung dimana pendapatan daerah dan belanja daerah mengalami peningkatan dan penurunan.

Berdasarkan permasalahan tersebut peneliti ingin melakukan “ **Analisis terhadap Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Bitung** ” tahun 2015-2019, dengan menggunakan alat ukur analisis rasio keuangan.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kinerja keuangan daerah pemerintah Kota Bitung tahun 2015-2019 dengan menggunakan alat ukur rasio keuangan daerah?

Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui kinerja keuangan daerah pemerintah Kota Bitung tahun 2015-2019, diukur dengan rasio keuangan daerah diantaranya rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Keserasian, dan Rasio Pertumbuhan.

Manfaat Penelitian

Bagi Akademis merupakan tambahan informasi yang bermanfaat bagi pembaca. Serta sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang tertarik pada bidang kajian yang sama. Bagi Pemerintah atau instansi terkait pemerintah daerah dapat menjadi bahan masukan bagi perencanaan pembangunan dan pengambilan keputusan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Bitung.

TINJAUAN PUSTAKA

Keuangan Daerah

Keuangan daerah adalah keseluruhan tatanan, perangkat kelembagaan, dan kebijakan penyelenggaraan yang meliputi pendapatan dan belanja daerah (Yani, 2002). Membahas prospek keuangan daerah untuk suatu wilayah yang akan dimekarkan, tentunya tak akan lepas dari pemahaman atas sumber-sumber penerimaan keuangan daerah serta belanja daerah yang merupakan pengeluaran daerah.

Pengertian Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan pemerintah daerah dan DPRD menurut asas Desentralisasi (Pasal 1 butir 2 UU 32/04), kemudian otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (pasal 1 butir 5 UU 32/04).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Dapat diartikan keseluruhan arti APBD menurut (Mardiasmo, 2012) APBD adalah suatu rencana kerja pemerintah daerah yang mencakup seluruh pendapatan atau penerimaan dan belanja atau pengeluaran pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten, dan kota dalam rangka mencapai sasaran pembangunan dalam kurun waktu satu tahun yang dinyatakan dalam satuan uang dan disetujui oleh DPRD dalam peraturan yang disebut Peraturan Daerah.

Analisis Rasio Keuangan Pemerintah Daerah

Rasio keuangan adalah membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan untuk mengetahui posisi keuangan suatu perusahaan serta menilai kinerja manajemen dalam suatu periode tertentu. Rasio keuangan merupakan indeks yang menghubungkan dua angka akuntansi dan diperoleh dengan membagi satu angka dengan angka lainnya (Horne, 2008).

Penelitian Terdahulu

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintah kota Kotamobagu, penelitian dilakukan di kantor walikota dan data yang digunakan adalah data kuantitatif berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif, untuk mengukur kinerja keuangan melalui rasio keuangan. Hasil penelitian menunjukkan, rasio derajat desentralisasi kinerja keuangannya, masih kurang, rasio ketergantungan keuangan daerah terhadap pemerintah pusat dan provinsi masih sangat tinggi, begitu juga dengan rasio kemandiriannya masih sangat rendah. Saran untuk pemerintah Kota Kotamobagu sebagaimana lebih meningkatkan PAD melalui penerimaan sektor pajak dan retribusi daerah.

Kerangka Pemikiran

Kinerja Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangannya secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab sangat menentukan Keberhasilan otonomi daerah. Sesuai dengan peraturan daerah (PP 58 tahun 2005, pasal 4) pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang ditetapkan setiap tahun.

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan pendekatan penelitian deskriptif. Metode penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menekankan analisisnya pada data-data numerical (angka) yang diolah dengan metode statistika.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Daerah Kota Bitung, dengan mengambil data di Kantor Walikota Bitung bagian keuangan, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah dan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD).

Adapun waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Desember 2019 sampai dengan selesai.

Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data analisis kuantitatif adalah Pengumpulan data yang bersifat kuantitatif yang berwujud angka-angka, kemudian dilakukan perhitungan selanjutnya data hasil perhitungan atau pengukuran tersebut diproses dengan cara dianalisis. Jenis data dalam penelitian ini merupakan laporan realisasi anggaran (APBD) kinerja Pemerintah Daerah Kota Bitung tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Data kualitatif yaitu jenis data yang di ukur secara tidak langsung dan bukan berupa angka melainkan berupa data yang diperoleh dari literature terkait. Jenis data dalam penelitian ini merupakan struktur organisasi, sejarah Pemerintah Kota Bitung dan lain-lain

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Menurut Suharso (2009:104), dokumentasi adalah data sekunder yang disimpan dalam bentuk dokumen atau *file* (catatan konvensional maupun elektronik), buku, tulisan laporan, notulen rapat, majalah, surat kabar, dan terkait buku

referensi, maupun jurnal-jurnal ekonomi studi pustaka. Data ini diperoleh dari kantor Wali Kota Bitung berupa Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Bitung tahun anggaran 2015-2019.

Teknik Analisis Data

Teknik analisa data merupakan suatu langkah yang paling menentukan dari suatu penelitian, karena analisa data berfungsi untuk menyimpulkan hasil penelitian. Data-data yang telah terkumpul dianalisis, teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Mengumpulkan data penelitian yang dilakukan berupa laporan keuangan dan realisasi APBD Pemerintah Daerah Kota Bitung.
2. Menghitung rasio keuangan daerah Pemerintah Daerah Kota Bitung.
3. Menghitung kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Bitung dengan mengukur rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas, rasio efisiensi keuangan daerah, rasio keserasian dan rasio pertumbuhan.
4. Menganalisis dan membahas kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Bitung dengan indicator yang sesuai dengan teori.
5. Menarik Kesimpulan

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

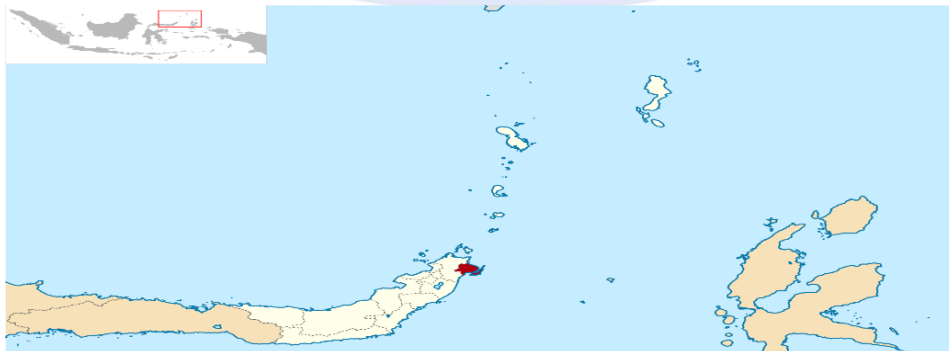
Profil Kota Bitung

Kota Bitung adalah salah satu kota di provinsi Sulawesi Utara. Kota ini memiliki perkembangan yang cepat karena terdapat pelabuhan laut yang mendorong percepatan pembangunan. Kota Bitung terletak di timur laut Tanah Minahasa. Wilayah Kota Bitung terdiri dari wilayah daratan yang berada di kaki gunung Dua Saudara dan sebuah pulau yang bernama Lembeh. Banyak penduduk Kota Bitung yang berasal dari suku Sangir, sehingga kebudayaan yang ada di Bitung tidak terlepas dari kebudayaan yang ada di wilayah Nusa Utara tersebut. Kota Bitung merupakan kota industri, khususnya industri perikanan..m

Kondisi Geografis

Kota Bitung adalah salah satu kota di provinsi Sulawesi Utara. Kota ini memiliki perkembangan yang cepat karena terdapat pelabuhan laut yang mendorong percepatan pembangunan. Kota Bitung terletak di timur laut Tanah Minahasa. Wilayah Kota Bitung terdiri dari wilayah daratan yang berada di kaki gunung Dua Saudara dan sebuah pulau yang bernama Lembeh. Banyak penduduk Kota Bitung yang berasal dari suku Sangir, sehingga kebudayaan yang ada di Bitung tidak terlepas dari kebudayaan yang ada di wilayah Nusa Utara tersebut. Kota Bitung merupakan kota industri, khususnya industri perikanan. Kota Bitung terletak pada posisi geografis di antara $1^{\circ} 23' 23''$ - $1^{\circ} 35' 39''$ LU dan $125^{\circ} 1' 43''$ - $125^{\circ} 18' 13''$ BT dan luas wilayah daratan 304 km^2 . Batas Wilayah Kota Bitung adalah sebagai berikut:

Utara : Kabupaten Minahasa Utara
 Timur : Laut Maluku
 Selatan: Laut Maluku
 Barat : Kabupaten Minahasa Utara



Gambar 1. Peta Kota Bitung

Kondisi Demografi

Demografi Suku bangsa Minahasa, Sangir, Tionghoa, Jawa, Gorontalo, Halmahera. Agama Kristen Protestan 62.95% Islam 32.32% Katolik 3.07% Buddha 1.39% Hindu 0.26% Konghucu 0.01%. Bahasa Bahasa Indonesia, Bahasa Manado, Bahasa Tonse, Bahasa Sangehe. Zona waktu WITA.

Kondisi Topografi

Topografi dan Iklim dari aspek topografis, sebagian besar daratan Kota Bitung berombak berbukit 45,06%, bergunung 32,73%, daratan landai 4,18% dan berombak 18,03%. Di bagian timur mulai dari pesisir pantai Aertembaga sampai dengan Tanjung Merah di bagian barat, merupakan daratan yang relatif cukup datar dengan kemiringan 0-150, sehingga secara fisik dapat dikembangkan sebagai wilayah perkotaan, industri, perdagangan dan jasa. Di bagian utara keadaan topografi semakin bergelombang dan berbukitbukit yang merupakan kawasan pertanian, perkebunan, hutan lindung, taman margasatwa dan cagar alam. Di bagian selatan terdapat Pulau Lembeh yang keadaan tanahnya pada umumnya kasar ditutupi oleh tanaman kelapa, hortikultura dan palawija. Disamping itu memiliki pesisir pantai yang indah sebagai potensi yang dapat dikembangkan menjadi daerah wisata bahari.

Aspek Ekonomi

Perekonomian Kota Bitung di dominasi oleh sektor pertanian dan perkebunan. Namun dalam perkembangannya sektor industri ternyata berkembang cukup pesat dan mencapai nilai tertinggi. Bertumbuhnya sektor industri sangat membantu perekonomian terutama dengan meluasnya kesempatan kerja. Bertambahnya perusahaan industri juga meningkatkan kesejahteraan penduduk terutama dengan terserapnya tenaga kerja sebanyak 21.755 orang, meningkat dari tahun sebelumnya yang daya ekonomi serapnya mencapai 21.290 tenaga kerja. Begitu juga dari sisi kapital di mana peningkatan jumlah perusahaan ini diikuti pula dengan peningkatan nilai investasi menjadi 541,67 miliar rupiah atau meningkat 23,47 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Pembahasan Hasil

Tabel 2. Rekapitulasi Rasio Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bitung Tahun Anggaran 2015 – 2019

Tahun	Rasio Kemandirian		Rasio Efektivitas		Rasio Efisiensi		Rasio Aktivitas (Rutin)		Rasio Aktivitas (Pembangunan)	
	%	Kriteria	%	Kriteria	%	Kriteria	%	Kriteria	%	Kriteria
2015	15	Rendah Sekali	111	Sangat Efektif	96	Kurang Efisien	77	Sangat Tinggi	23	Cukup
2016	13	Rendah Sekali	85	Cukup Efektif	106	Tidak Efisien	72	Sangat Tinggi	28	Cukup
2017	17	Rendah Sekali	106	Sangat Efektif	106	Tidak Efisien	75	Sangat Tinggi	24	Cukup
2018	13	Rendah Sekali	95	Efektif	98	Kurang Efisien	69	Sangat Tinggi	31	Sedang
2019	14	Rendah Sekali	85	Cukup Efektif	92	Kurang Efisien	75	Sangat Tinggi	25	Cukup
Rata-Rata	12	Rendah Sekali	96	Efektif	98	Kurang Efisien	74	Sangat Tinggi	26	Cukup

Sumber: Data diolah (2020)

Tabel 3. Rekapitulasi Rasio Pertumbuhan Pemerintah Daerah Kota Bitung Tahun Anggaran 2015 – 2019

Tahun	Pertumbuhan PAD		Pertumbuhan Pendapatan		Pertumbuhan Aktivitas (Rutin)		Pertumbuhan Aktivitas (Pembangunan)	
	%	Kriteria	%	Kriteria	%	Kriteria	%	Kriteria
2015	27.08	Cukup	-2.83	Sangat Kurang	7.95	Sangat Kurang	-2.07	Sangat Kurang
2016	-27.98	Sangat kurang	14.84	Cukup	-1.43	Sangat kurang	23.20	Cukup
2017	48.05	Sedang	2.23	Sangat kurang	6.56	Sangat Kurang	-11.24	Sangat Kurang
2018	-10.69	Sangat kurang	10.14	Sangat Kurang	9.82	Sangat kurang	33.83	Sedang
2019	-45.16	Sangat kurang	-19.87	Sangat kurang	-5.09	Sangat kurang	-37.12	Sangat Kurang
Rata-Rata	-1.74	Sangat kurang	0.90	Sangat Kurang	3.56	Sangat Kurang	1.32	Sangat Kurang

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Jika dilihat dari tahun ke tahun pola kemandirian keuangannya masih tergolong pola hubungan Instruktif karena masih tergolong dalam interval 0% - 25% dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada pemerintah daerah itu sendiri.
2. Menurut uraian dan hasil perhitungan pada Rasio Efektivitas PAD Efektivitas Kinerja Kota Bitung sudah sangat efektif karena rata rata sudah diatas 100%.
3. Berdasarkan perhitungan pada Rasio Efisiensi Keuangan tergolong Efisien karena rata-rata rasionya (kurang dari) <100%.
4. Dari perhitungan Rasio Keserasian tersebut dapat dilihat bahwa Rasio Belanja Operasi/ Pembangunan dan Rasio Belanja Modal/Rutin yang belum stabil dari tahun ke tahun. Pada Rasio Belanja Modal menurut uraian dan perhitungan di atas bahwa sebagian besar dana yang dimiliki Pemerintah Daerah Kota Bitung masih diprioritaskan untuk kebutuhan belanja operasi sehingga rasio belanja modal relatif kecil. Ini dapat dibuktikan dari rata-rata rasio belanja operasi yang masih besar dibandingkan dengan rata-rata rasio belanja modal.
5. Berdasarkan penghitungan Rasio Pertumbuhan PAD, PAD Kota Bitung fluktuatif. Pemerintah Kota Bitung harus selalu meningkatkan PAD nya dengan cara mengoptimalkan berbagai macam potensi yang dimilikinya. Akan lebih baik apabila tidak terlalu bergantung pada bantuan dari pemerintah pusat agar bisa mandiri mengelola daerahnya dengan PAD yang tinggi. Rasio Pertumbuhan Pendapatan dan belanja daerahnya selalu mengalami perkembangan secara positif karena selalu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun.

Saran

- 1) Bagi Pemerintah Daerah Kota Bitung harus mampu meningkatkan dan memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah. Sebenarnya potensi yang dimiliki Kabupaten Kebumen mempunyai dampak yang besar bagi masyarakat sekitar. Potensi tersebut antara lain : di bidang pendidikan, kesehatan, pariwisata, kebudayaan, industri kreatif hingga perdagangan. Pemerintah Daerah Kota Bitung juga seharusnya tidak selalu mengandalkan bantuan dari pemerintah pusat. Agar kedepannya bisa tumbuh menjadi kabupaten yang mandiri, mampu mengelola keuangannya dengan baik dan benar, serta kesejahteraan masyarakat lebih meningkat.
- 2) Bagi Peneliti Selanjutnya
Peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas lingkup wilayah penelitian, tidak hanya mengambil dari 1 Kota saja tetapi lebih luas lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Alvina, D., Amir, A., Yudi. (2018). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Jambi. *Jurnal*. Hal. 25-36. Universitas Jambi. <https://jurnal/5377Article%20Text-11405-1-10-20180807.pdf>. Diakses tanggal 13 Januari 2020.
- Cicilia V. S. E., Murni S., Engka D. M. (2019) Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Serta Kemandirian Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*. Vol.17. Universitas Samratulangi Manado. <https://jurnal%20enci%20sri/10245-20402-1-SM.pdf>. Diakses 23 Januari 2020.
- Fajriansyah, Y., Elim, I., Walandouw, S.K. (2019). Analisis Kinerja KEuangan Pemerindah Kota Bitung Tahun Anggaran 2016-2017. *Jurnal EMBA*. Vol.7, Hal. 4465-4474. Universitas Samratulangi Manado. <https://doi.org/10.25794/emba.v7i3.25146>. Diakses tanggal 13 Januari 2020
- Gaffar. (2003). *Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Halim. (2002). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- _____ (2007). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- _____ (2012). *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Edisi Ketiga. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Hendawati, H., Komarasakti, D., Ansori S. (2017). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan di Pemerintahan Daerah *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*. Vol.5 | No.3 | 2017. Universitas Sangga Buana-YPKP. <https://jurnal/9229-19323-3-PB.pdf>. Diakses tanggal 13 Januari 2020.
- Horne. (2008). *Fundamental of Financial Management. Twelfth Edition*. Perentice: Hall International.
- Kaho. (2007). *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Koswara. (2000). *Menyongsong Pelaksanaan Otonomi Daerah Berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 1999: Suatu Telaah dan Menyangkut Kebijakan, Pelaksanaan dan Kompleksitasnya*. CSIS XXIX Nomor 1. Jakarta.
- Lubis, P. K., Hafni, N. (2017). Analisis Rasio Keuangan Untuk mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhan Batu Tahun Anggaran 2011-2013. *Jurnal*. Volume 1. No. 1. Universitas Negeri Medan. <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/JAKS/article/download/815/603>. Diakses 13 Januari 2020.
- Mahmudi. (2010). *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Erlangga.
- Mardiasmo. (2004). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Hal. 99. Yogyakarta: Andi.(2012). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mokodompit, P. S., Pangemanan, S. S., Elim, I. (2014). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu. *Jurnal EMBA*. Vol.2 No.2, Hal. 1521-1527. Universitas Samratulangi Manado. <https://jurnal/4914-9476-1-SM.pdf>. Diakses tanggal 13 Januari 2020.
- Munawir. (2004). *Analisis Laporan Laporan Keuangan*. Yogyakarta: Liberty.
- Oktavianus, D., Murni, S., Saerang, I.S. (2015). Analisis Perbandingan Kemampuan Keuangan Daerah Pada Kota Bitung Dan Kota Tomohon Periode Anggaran 2010 – 2014. *Jurnal EMBA*. Vol.3 No.3, Hal.927-

938. Universitas Samratulangi. <https://jurnal%20enci%20sri/9716-19337-1-SM.pdf>. Diakses 23 Januari 2020.

Pandjaitan, F. P., Parengkuan, T., Untu, V. N. (2018). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Manado Tahun 2011-2016. *Jurnal EMBA*. Vol.6 No.3, Hal. 1398 – 1407. Universitas Samratulangi Manado. <https://jurnal/20224-42261-1-PB.pdf>. Diakses tanggal 13 Januari 2020.

Patompo, P. A., Untu, V. N. (2019). Analisa Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2013-2016. *Jurnal EMBA*. Vol.7 No.4, Hal. 3159-3168. Universitas Samratulangi Manado. <https://doi.org//10.35794/emba.v7i3.24202>. Diakses tanggal 13 Januari 2020.

Poyoh, C. M., Murni S., Tulung, J. E. (2017). Analisis Kinerja Pendapatan Dan Belanja Badan Keuangan Daerah Kota Tomohon. *Jurnal EMBA*. Vol.5 No.2, Hal. 745-752. Universitas Samratulangi Manado. <https://jurnal%20enci%20sri/15958-32018-1-SM.pdf>. Diakses 23 Januari 2020.

Publik. Yogyakarta: Andi.

Rahmawati, A., Putra, I. W. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2010-2012. *Jurnal*. Vol.15.3, Hal. 1767-1795. Universitas Udayana. <https://jurnal/17858-1-41051-1-10-20160609.pdf>. Diakses tanggal 13 Januari 2020.

Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 *tentang Pemerintah Daerah*.

_____ (2005). Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005 *tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*.

Republik Indonesia. (2006). Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 *tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.

Ropa, M. O. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal EMBA*. 738 Vol.4 No.2, Hal. 738-747. Universitas Samratulangi Manado. <https://jurnal/13153-26256-1-SM.pdf>. Diakses tanggal 13 Januari 2020.

Sugiyono. (2017). *Etode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, CV.

Suparmoko, M. (2002) *Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*. Ekonomi

Tambuwun, E. L., Pangemanan, S.S., Afandi, D. (2014). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintahan Kota Manado. *Jurnal EMBA*. Vol.2 No.4, Hal. 81-89. Universitas Samratulangi Manado. <https://jurnal/6220-12118-1-SM.pdf>. Diakses tanggal 13 Januari 2020.

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 *tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.

Wikipedia. (2019). “*Profil Kota Bitung*”. https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kota_Bitung&oldid=16399224. Diakses tanggal 14 Januari 2020, pukul 19.11 wita.